

BAB I

PENDAHULUAN

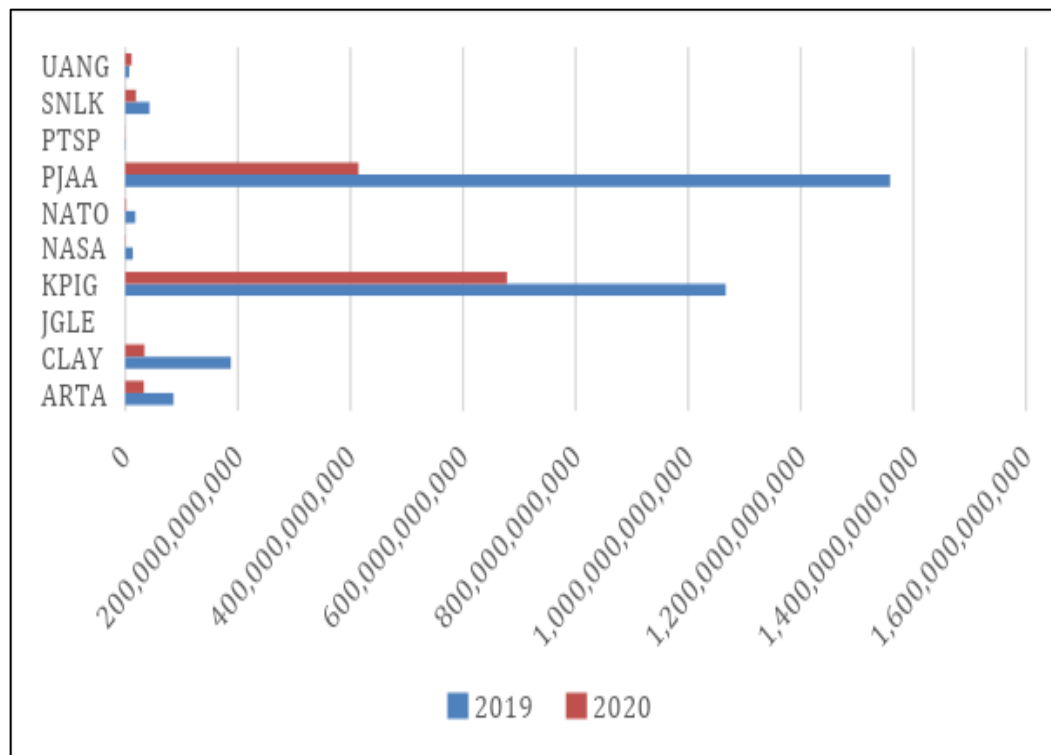
1.1 Latar Belakang

Penyebaran virus Corona (Covid-19) berdampak pada beberapa bisnis, termasuk sektor pariwisata. Bisnis pariwisata di Amerika Utara, Eropa, dan Asia mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan (Pusparisa, 2020). Pariwisata Asia mengalami penurunan sebesar 27% dari pendapatan terbesar semula 225,9 miliar dolar AS pada 2019 menjadi 16,7 miliar dolar AS pada tahun ini (Pusparisa, 2020). Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, dengan adanya pandemi Covid-19 tentunya menjadi tamparan besar bagi perusahaan-perusahaan di bidang pariwisata, perusahaan menjadi terancam bangkrut, atau mungkin dapat berangsur membaik (Pramana *et al.*, 2021).

Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kasus positif Covid-19 telah ditemukan dan dikonfirmasi di Indonesia. Di Indonesia, jumlah keseluruhan kasus Covid-19 mencapai 16 juta pada akhir April 2021. Untuk menghindari penularan lebih lanjut, pemerintah akhirnya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam keadaan seperti itu, kondisi pariwisata di Indonesia saat ini sedang sangat terpengaruh (Regita *et al.*, 2021).

Perbandingan jumlah pendapatan sektor wisata sebelum dan selama Covid 19 dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut ini.

Gambar I.1 Pendapatan Sektor Wisata Sebelum dan Selama Covid-19.



Sumber: Bursa Efek Indonesia.

Menurut Gambar I.1 bisa diketahui sebelum Covid-19 atau pada tahun 2019, dari sepuluh perusahaan sektor pariwisata yang diakui BEI, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) ialah suatu perusahaan dengan pendapatan tertinggi yang kemudian diikuti oleh PT MNC Land Tbk (KPIG). Data tersebut juga menunjukkan adanya penurunan pendapatan, pada tahun 2020 PT Pembangunan Jaya Ancol memiliki pendapatan mencapai hampir 1.4M dalam setahun, namun adanya pandemi covid yang terjadi mengakibatkan penurunan hingga 70%.

Penurunan pendapatan yang dialami oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, diakibatkan karena adanya penurunan persentase sebesar 76 persen, khususnya dari 18 juta kunjungan pada 2019 menjadi 4,5 juta pada 2020. Sebagai salah satu perusahaan sektor pariwisata terbesar di DKI Jakarta, tentu hal ini membuat kerugian yang sangat besar. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk diketahui menutup beberapa unit hiburannya tanpa batas waktu sehingga mengalami kerugian pendapatan yang cukup parah akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Hal ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Pada Agustus 2020, sebanyak dua pekerja Jaya Ancol diberhentikan dan 100 karyawan telah dipotong gajinya, dikurangi jam kerjanya, dan diberhentikan sementara (Nurhaliza, 2020).

Berbagai kebijakan yang dilakukan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk terhadap karyawannya tentu menjadikan perusahaan harus memberikan program berupa dana pensiun, terutama bagi karyawan yang di PHK. Di sektor korporasi, kebijakan pensiun merupakan komponen yang tidak terpisahkan, karena merupakan kompensasi atas jasa karyawan terhadap perusahaan.

Pemberian dana pensiun tidak hanya berdampak pada produktivitas usaha tetapi juga mempengaruhi keuangan jika usaha tidak dikelola dengan bijak. PSAK 24 ialah deklarasi prinsip akuntansi yang mengatur pelaporan kebijakan pensiun sebagai upah kerja (IAI, 2014). Diharapkan bahwa setiap perusahaan bisa secara akurat mencatat kebijakan pensiunnya sehingga setiap hak atau tanggung jawab akan diakui sebagai informasi yang akurat. Perusahaan publik dan korporasi yang menjual saham di BEI wajib menggunakan PSAK untuk mencerminkan status

korporasinya secara tepat. Standar akuntansi Indonesia merupakan adaptasi dari standar akuntansi keuangan internasional, khususnya IFRS (*International Financial Report Standards*), sehingga investor asing dapat mengandalkan informasi yang tersedia dan bersedia berinvestasi di pasar keuangan Indonesia (Tinangon & Lamohamad, 2015).

PSAK mencakup banyak hal yang dimulai dengan bagian-bagian dalam laporan keuangan dan catatan yang dijelaskan dalam PSAK. Penelitian ini akan membahas tentang PSAK 24 dalam kaitannya dengan kemaslahatan sosial yang berhubungan dengan program dana pensiun. Terlebih lagi, dengan adanya kondisi pandemi seperti saat ini, serta pendapatan perusahaan yang menurun, tentu menimbulkan berbagai pertanyaan seperti bagaimana perusahaan tetap mengelola dana pensiun untuk karyawannya. Permasalahan dana pensiun ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia tentang hak-hak pekerja UU Nomor 11 Tahun 1992 dan kewajiban perusahaan yang berlaku dalam PSAK 24 dalam amandemen 2014.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Nefry *et al.*, (2019) dan menyatakan bahwa untuk hal pengungkapan, perusahaan yang diteliti menyajikan seluruh jumlah tunjangan karyawan pada laporan laba rugi di akun pengeluaran tenaga kerja. Selain itu, informasi tentang tunjangan karyawan dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Watung *et al.*, (2017) yang mana PT Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Kotamobagu menyampaikan semua besaran tunjangan karyawan di bagian belanja tenaga kerja pada Laporan Laba

Rugi. Selain itu, informasi mengenai tunjangan karyawan dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Sementara penelitian yang dilakukan Wulandari & Dewi, (2019), menemukan bahwa PT Karya Hevea Indonesia telah melaksanakan penilaian, pengakuan dan pengungkapan dalam hal pemberian gaji, tunjangan non moneter, bagi hasil, dan bonus sesuai dengan PSAK 24, PT Karya Hevea Indonesia belum melaksanakan penilaian, pengakuan dan pengungkapan terkait cuti berbayar jangka pendek.

PSAK 24 sangat penting agar perusahaan mengetahui tunjangan karyawan yang diberikan. Jika tidak ada akun upah kerja dalam catatan finansial perusahaan, tanggung jawab atas upah kerja “tersembunyi” secara tidak langsung. Pengungkapan tunjangan karyawan yang tidak tepat bisa memicu ketidakpercayaan investor, sehingga menghambat kesuksesan perusahaan dan memengaruhi likuiditasnya. Jika ditangani dengan tidak tepat, tunjangan karyawan juga dapat memengaruhi efisiensi perusahaan dan produktivitas karyawannya. Perlakuan yang tidak tepat terhadap karyawan bisa memberi efek negatif pada bisnis karena bisa memicu staf untuk mogok kerja atau terlibat dalam kegiatan penipuan termasuk korupsi dan penyelundupan yang bisa merugikan perusahaan (Watung *et al.*, 2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, penelitian ini memiliki perbedaan pada objek yang digunakan, yang mana belum ada penelitian mengenai PSAK 24 pada industri pariwisata, khususnya PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisa perbandingan penerapan PSAK 24 yang diterapkan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebelum dan selama pandemi Covid-19.

Dengan demikian, topik penelitian dalam karya tulis ilmiah ini yaitu penerapan PSAK 24 mengenai upah kerja yang berupa program pensiun di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk pada periode tahun sebelum pandemi dan selama pandemi Covid-19. Sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan karya tulis yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PSAK 24 PADA PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam karya tulis ini ialah sebagai berikut, menurut konteks informasi yang telah dipaparkan sebelumnya.

1. Bagaimana kebijakan dan perlakuan akuntansi program pensiun pada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebelum Covid-19?
2. Bagaimana kebijakan dan perlakuan akuntansi program pensiun pada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk selama Covid-19?
3. Apakah kebijakan dan perlakuan akuntansi terkait program pensiun PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sudah sesuai dengan PSAK 24?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penulisan ini dilakukan guna menjawab permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kebijakan dan perlakuan akuntansi program pensiun sebelum Covid-19 yang dilakukan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
2. Untuk mengetahui kebijakan dan perlakuan akuntansi program pensiun selama Covid-19 yang dilakukan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

3. Untuk mengetahui kebijakan akuntansi terkait program pensiun perusahaan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ada dalam PSAK 24.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dilakukan dengan memfokuskan pokok permasalahan pada perlakuan akuntansi terkait dana pensiun pada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dengan menggunakan laporan keuangan sebelum dan selama Covid-19 yaitu pada tahun 2019 dan 2020 serta dokumen perusahaan lainnya yang dapat menunjang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan membandingkan bagaimana perlakuan akuntansi terkait program dana pensiun sebelum dan selama Covid-19 sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan yaitu PSAK 24.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Temuan ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai perlakuan akuntansi mengenai program pensiun pada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akuntansi program pensiun yang ada dalam PSAK 24.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Temuan ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman peneliti mengenai perlakuan akuntansi kebijakan pensiun di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dan bisa berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk menerapkan keahlian akuntansi kebijakan pensiun.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyajikan masukan dan evaluasi terkait penerapan program pensiun yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Akan dijelaskan hal-hal yang melatarbelakangi penulisan Karya Tulis Tugas Akhir tersebut pada bab ini. Selain itu bab ini juga menjelaskan tujuan, ruang lingkup, metode pengumpulan data, dan sistematika.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, peneliti akan memberikan gambaran umum tentang PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, termasuk deskripsi singkat bisnis, visi dan tujuan, serta struktur organisasinya. Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan subjek karya tulis dan menjelaskan ide-ide di balik penulisan. Landasan teori yang akan peneliti tulis meliputi definisi dan klasifikasi program pensiun, pengakuan program dana pensiun, pengukuran dana pensiun, pemberlakuan dana pensiun, proses klaim dana pensiun, dan penyajian serta pengungkapan dana pensiun.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Metode penelitian yang akan dilakukan pada saat penulisan karya tulis akan dijelaskan pada bab ini. Bagian metode penelitian akan dibagi menjadi tiga subbab yaitu jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, serta objek penelitian.

Dalam pembahasan peneliti akan membahas tentang standar akuntansi yang digunakan sebagai standar dalam penulisan laporan tahunan PT Pembangunan Jaya

Ancol Tbk dan mengevaluasi penerapan akuntansi dalam kaitannya dengan rencana pensiun pada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini terdapat dua subbab yaitu kesimpulan dan saran. Bagian penutup akan memuat kesimpulan dari hasil *review* yang dibuat oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan bagian rekomendasi akan memuat saran-saran yang dapat diberikan oleh para pemangku kepentingan dan pembaca berdasarkan hasil evaluasi peneliti pada bab-bab sebelumnya.